



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IIIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH NASIONAL

TERMINAL ANTAR NEGARA

- I. TERMINAL BARANG PERBATASAN
1. Badau (Provinsi Kalimantan Barat) (II/2)
 2. Entikong (Provinsi Kalimantan Barat) (II/2)
 3. Aruk (Provinsi Kalimantan Barat) (II/2)
 4. Motaain (Provinsi Nusa Tenggara Timur) (II/2)
 5. Motamasin (Provinsi Nusa Tenggara Timur) (II/2)
 6. Wini (Provinsi Nusa Tenggara Timur) (II/2)
 7. Skouw (Provinsi Papua) (II/2)
- II. TERMINAL PENUMPANG PERBATASAN
1. Entikong (Provinsi Kalimantan Barat) (II/2)
 2. Kefamenanu (Provinsi Nusa Tenggara Timur) (II/2)
 3. Entrop (Provinsi Papua) (II/2)

Keterangan:

- I – IV : Tahapan Pengembangan
1 : Pemantapan Terminal
2 : Pengembangan Terminal

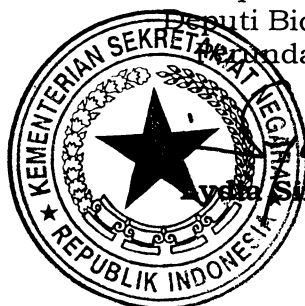
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

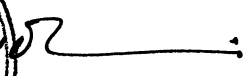
ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,




Ayu Silvanna Djaman